Analysis of Peace Coexistence Between Sunni and Shia Communities in Sendangsari Hamlets District of Jepara

Menelaah Koeksistensi Damai antara Komunitas Sunni dan Syiah di Dusun Sendangsari Kabupaten Jepara

Andi Ahmad Rukka Haryadi
Universitas Gadjah Mada
Jl. Bulaksumur, Kec. Depok, Sleman
Yogyakarta

Abstract

This research is aim to explain the causes of peace coexistence between Sunni and Shia community in dusun Sendangsari, kabupaten Jepara. Type of research method that use are qualitative with snowball of chain sampling as the main technique to collecting data for analysis. There are three hypthothesis which researcher use to explain the causes of peace in this research, first is to observe how the structure of civic life between this two communities, second self policing as the mechanism to contain violence, and third how elite integration would contribute to explain the peace coexistence. The results show that the structure of civic life which cut the religion ethnic lines between two communities stand as important causes. There were 5 form of civic engagement as part of the finding in this research, and extent to mechanism of self policing that containing violence. Consensus on cultural and structural context that marked the elite integration, legitimize the peace behaviours between this two communitas, and at the same time delegitimize the intolerance perception or behaviour that would affect the peace relationship between Sunni and Shia community. Also, this peace coexistence cannot be separated from the cognitive fact which stand as collective consciousness (norm) of the two communities, which are : Religion faith is part of individual rights, but public affairs are responsibilities of every individual who live in dusun Sendangsari.

Keywords: *Sunni, Shia, peace coexistence, civic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab koeksistensi damai antara komunitas Sunni dan Syiah di dusun Sendangsari Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik *snowball of chain sampling* sebagai upaya dalam pengumpulan data. Terdapat tiga hipotesis yang digunakan dalam penelitian hubungan damai ini yaitu 1) penelaahan struktur kehidupan kewargaan; 2) *self policing*; dan 3) integrasi elit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada struktur kehidupan kewargaan terdapat hubungan yang melampaui batas-batas etnis keagamaan (*interethnic engagement*) yang ditandai dengan 5 (lima) bentuk jaringan kewargaan (K) antar warga Sunni dan Syiah di dusun. Jaringan kewargaan tersebut menimbulkan ekstensi (reaksi; implikasi; mekanisme pencegahan konflik) dari warga Sunni dan Syiah untuk meredam situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan; yang salah satu bentuk ekstensi tersebut adalah *self policing*. Jaringan kewargaan (*civic engagement*) ini didukung oleh konsensus kultural dan struktural (*consociationalism*) sebagai bagian dari integrasi elit – antar tokoh Sunni dan Syiah – yang memberikan legitimasi pada perilaku damai; serta legitimasi terhadap jaringan kewargaan yang telah lama terjalin antara warga Sunni dan Syiah dalam dusun. Selain itu koeksistensi damai antar dua komunitas keagamaan tersebut tidak lepas dari sikap kognitif dari masing-masing warga Sunni dan Syiah yaitu : urusan keagamaan menjadi hak pribadi masing-masing individu, namun ketika masuk pada urusan sosial hal itu menjadi kewajiban bersama antar warga dusun.

Kata kunci: *Sunni, Syiah, koeksistensi damai, kewargaan*

PENDAHULUAN

Tadjoedin (2004) dalam salah satu publikasi artikel ilmiah, mengeksaminasi 3 (tiga) hipotesis yang menjelaskan mengapa ada suatu wilayah – multietnis – yang relatif damai tanpa terjadi kekerasan, dan sebaliknya mengapa ada suatu daerah yang juga multietnis, namun sangat rentan terjadi kekerasan komunal.

Eksaminasi hipotesis tersebut akan menjadi kerangka teoritis tentang mengapa penelitian ini dilakukan, yakni sebagai acuan analisis untuk mengetahui faktor penyebab koeksistensi damai dalam suatu wilayah tertentu, meskipun dalam wilayah tersebut terdapat perbedaan nilai-nilai –

etnis keagamaan – yang signifikan, yang mana objek studi dari penelitian ini adalah warga Sunni dan Syiah yang berada di dusun Sendangsari (Jepara).

Hipotesis pertama adalah Varshney (2002), yang menjelaskan bahwa jenis partisipasi dari jaringan kewargaan (*civic engagement*) menjadi variabel yang menyebabkan perbedaan dua fenomena sosial tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa : jika jenis partisipasi (*engagement*) pada suatu masyarakat yang multi-etnis bersifat intra-etnis (*bonding*) atau terpisah, maka kecenderungan kekerasan antar dua atau lebih komunitas etnis sangat rentan terjadi. Sebaliknya jika partisipasinya cenderung inter-etnis (*bridging*), maka masyarakat memiliki kekebalan (*immune*) terhadap kekerasan, yang – secara empiris – disebabkan oleh aksi klarifikasi dan kerja sama antara dua etnis yang berbeda, dalam mengatasi friksi atau polarisasi yang berasal dari luar atau dalam ruang lingkup masyarakat tersebut.

Partisipasi kewargaan (*civic engagement*) ini dibedakan pula menjadi dua bentuk yaitu: hubungan asosiatif (seperti serikat-serikat dagang, komunitas-komunitas hobi, organisasi-organisasi profesional, dan lain-lain) dan *quotidian* (yaitu hubungan atau interaksi sehari-hari antar warga masyarakat). Jika dua bentuk hubungan ini – asosiatif dan *quotidian* – terjalin secara inter-etnis, maka hubungan masyarakat yang berbeda secara etnis – yang di dalamnya terdapat perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan kasta – akan relatif lebih damai, bila dibandingkan dengan partisipasi yang hanya bersifat intra-etnis. Selain itu, dijelaskan pula bahwa hubungan asosiatif ini lebih kuat terhadap ancaman seperti rumor-rumor yang menyebabkan ketegangan antar etnis, bila dibandingkan dengan hubungan jalinan kewargaan yang *quotidian* atau sehari-hari (Varshney, 2002).

Kedua adalah *Self (Community) Policing*. Hipotesis ini berangkat dari penelitian Fearon dan Laitin (1996). *Self (Community) Policing* adalah mekanisme pencegahan kekerasan antar komunal melalui peran dari pimpinan dan tokoh-tokoh dari golongan etnis setempat. Peran yang dimaksud adalah kemampuan para pimpinan dan tokoh setempat – pada golongan etnis masing-masing – untuk mengontrol perilaku anggota-anggota mereka yang dianggap sebagai biang masalah (*trouble maker*) terhadap golongan etnis yang lain.

Menurut Tadjoeidin (2004) berdasarkan Fearon dan Laitin (1996), mekanisme penyelesaian konflik ini sangat relevan dalam kehidupan masyarakat yang tersegregasi secara komunal. Secara umum Indonesia termasuk salah satu wilayah yang penduduknya tersegregasi secara keagamaan, suku, dan ras; sehingga mekanisme *self policing* ini memiliki fungsi yang signifikan dalam pencegahan kekerasan; sebab kekerasan antar komunal cenderung dipicu oleh (1) tingkat segregasi komunal yang tinggi pada suatu wilayah dan (2) kekerasan antar etnis cenderung dipicu dari individu-individu (unit sosial terkecil) dari masing-masing golongan etnis dan ter-eskalasi secara komunal. *Self (Community) Policing* yang menekankan kontrol dari tokoh-tokoh masing-masing komunitas setempat terhadap anggotanya, sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia tersebut (Tadjoeidin, 2004).

Terakhir adalah integrasi elit. Integrasi elit adalah hasil pengamatan Tadjoeidin (2004) terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia, yang mana fragmentasi (konflik) di antara elit cenderung diikuti oleh para pengikutnya, dan ter-eskalasi menjadi kekerasan antar massa atau komunal.

Berdasarkan Higley dan Moore (1981), Tadjoeidin (2004) mengungkapkan bahwa ciri dari terintegrasinya suatu elit adalah (1) Hadirnya konsensus yang menjadi nilai bersama (*shared values*) di antara elit (tokoh-tokoh masyarakat), yang didorong oleh bentuk kerja sama (*cooperation*) dan rasa saling percaya (*mutual trust*) antar anggota masyarakat yang berbeda secara komunitas (baca: etnis); lalu (2) Adanya hubungan sosial (*network*) yang terbuka (*inclusive*) dan interaksi individu yang luas (*extensive*) aspek-nya antar anggota-anggota masyarakat yang berbeda secara komunitas (etnis) tersebut. Jika kedua ciri atau syarat ini tidak hadir (*exist*) dalam elit atau masyarakat, maka dikatakan masyarakat tersebut ter-fragmentasi, alias tidak ter-integrasi secara komunal.

Integrasi elit bisa pula dipahami dengan dua macam interpretasi : (1) hadirnya koordinasi antar elit; dan (2) adanya pembagian peran dalam struktur kekuasaan (*power sharing*) atau wewenang di ruang lingkup masyarakat (*consociational polity*) tersebut. Koordinasi antar elit bisa dipahami sebagai *self (community) policing*, sedangkan praktik konsosiasional (*power sharing*) terkait dengan konsensus nilai bersama yang disebutkan oleh Higley dan Moore (1981) di atas. Praktik konsosiasional tidak hanya terkait dengan konsensus nilai bersama, namun juga konsensus dalam praktik bersama (Tadjoeidin, 2004).

Berdasarkan 3 (tiga) hipotesis ini peneliti akan menguji apakah analisa eksaminasi tersebut menjadi variabel pula terhadap kehidupan damai yang terjalin antara komunitas Sunni dan Syiah yang berada di dusun Sendangsari, Jepara. Sebab berdasarkan beberapa penelitian di lokasi ini, salah satunya adalah Amaliyah (2015), kehidupan antara komunitas (etnis) Sunni dan Syiah di lokasi ini tidak seperti hubungan yang terjadi di Sampang (Madura) di mana terjadi kekerasan yang berujung pengusiran terhadap warga Syiah, dan juga di tempat-tempat lain di mana terjadi dikotomi etnis keagamaan (Sunni-Syiah) yang diwarnai oleh kekerasan, seperti: Bangil (Pasuruan) dan Bangkalan (Madura).

Selain itu berdasarkan penelusuran peneliti, literasi-literasi mengenai interaksi antar komunitas etnis keagamaan Sunni dan Syiah di Indonesia, baik itu ilmiah atau media-media pemberitaan populer, lebih banyak menggambarkan perseteruan antar kedua golongan tersebut – terutama sejak konflik antar Sunni dan Syiah di Sampang tersebar di masyarakat luas, tanpa memperhatikan bahwa terdapat pula beberapa wilayah di mana warga Sunni dan Syiah tetap relatif ber-koeksistensi secara damai, tanpa terpengaruh oleh pemberitaan kekerasan antara dua etnis keagamaan ini. Seperti yang terdapat di Pekalongan, Jepara, Bengkulu, Demak, Balikpapan, Kendari, dan lain-lain (Afdillah, 2012; Miftakhuddin, 2013; Zulfa *et al*, 2009)

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara terstruktur dan tidak terstruktur di lokasi penelitian. Proses penelitian dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, dengan pemilihan informan melalui metode *snowball of chain sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan rekomendasi informan yang telah diwawancara sebelumnya. Selain itu untuk menghindari bias, penulis melakukan *triangulasi* data melalui sumber data primer (wawancara terhadap informan kunci serta observasi terhadap kegiatan kewargaan), dan sumber data sekunder; yaitu penelitian-penelitian ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya – di lokasi penelitian penulis. Hal ini dilakukan pula untuk menggali pengetahuan empiris dan teoritis secara mendalam terhadap hasil pengumpulan dan analisis data yang telah diperoleh (Rahardjo, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Intraetnis: Terpisahnya Praktik Keagamaan tanpa Riwayat Kekerasan

Selama melakukan wawancara dan observasi di lapangan, pada umumnya praktik keagamaan warga dusun Sendangsari – baik itu Sunni dan Syiah – telah terpisah dalam tiga (3) bentuk, yaitu (1) praktik ibadah *mahdhah*; (2) praktik *majelis taklim* (pengajian) dan (3) praktik simbolik keagamaan. Ketiga praktik ini dilakukan secara terpisah atau intraetnis, apakah itu dari komunitas Sunni ataupun dari komunitas Syiah yang berada di ruang lingkup dusun.

Secara definisi (1) praktik ibadah *mahdhah* meliputi perilaku keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam secara umum, yang pelaksanaannya terdapat syarat dan rukun tertentu yang sudah ditentukan dalam Islam. Seperti salat lima waktu, salat Jumat, salat id, puasa, haji, dan lain-lain. Lalu (2) praktik *majelis taklim* adalah tempat di mana pengetahuan-pengetahuan keagamaan diajarkan secara non-formal. Pengetahuan keagamaan ini diajarkan oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi rujukan atau panutan warga dusun, baik beridentitas Sunni atau Syiah. Terakhir (3) praktik simbolik keagamaan, praktik ini merupakan aktivitas-aktivitas simbolik keagamaan, yang menjadi representasi dari keyakinan masing-masing golongan Sunni dan Syiah. Seperti – jika dalam istilah lokal mereka – *haul*, *maulid*, *nisfu' syaban*, *tirakatan*, *idul fitri*, *idul adha*, *muharraman*, *wiladah* dan lain-lainnya.

Lebih lanjut, terjadinya pemisahan praktik keagamaan ini – berdasarkan observasi dan wawancara, bukan terjadi karena dorongan kebencian, sentimen kelompok, konstruksi negatif, atau riwayat kekerasan yang terjadi antar masing-masing golongan Sunni ataupun Syiah. Terbentuknya interaksi intraetnis ini – dalam konteks praktik keagamaan – lebih kepada adanya kesadaran kolektif antar dua kelompok, bahwa terdapat perbedaan dari tata cara praktik

keagamaan mereka, sehingga mereka lebih memilih pelaksanaan praktik keagamaan secara terpisah. Kesadaran ini ditandai oleh adanya dua tempat ibadah di dusun, yang mana masing-masing golongan melaksanakan praktik keagamaannya secara komunal. Yaitu Masjid Mbah Muhammad Arif milik warga Sunni, dan *Mushola* Al-Husainiyah milik warga Syiah.

Bukti lain yang menunjukkan absennya riwayat kekerasan atau konstruksi negatif antar masing-masing kelompok tersebut adalah adanya pemberian tempat ibadah (hibah) dari tokoh-tokoh Sunni terhadap warga Syiah untuk tetap melaksanakan praktik keagamaannya, yang hingga sekarang warga Syiah tetap menyebut pemberian tersebut sebagai *musala* untuk menghargai warga Sunni di dalam dusun, sebab menurut mereka – warga Syiah – bahwa satu-satunya yang pantas disebut *masjid* adalah Masjid Mbah Muhammad Arif yang sering dipakai ibadah oleh warga Sunni di dusun. Di samping itu, pembangunan atau rekonstruksi *musala* untuk warga Syiah tersebut, bahkan dibantu pula oleh warga Sunni di dusun.

Selain hal tersebut, temuan lain yang tercermin dari perilaku mereka adalah hadirnya inklusifitas dalam ruang praktik keagamaan dari masing-masing golongan, baik itu Sunni ataupun Syiah. Inklusifitas yang dimaksud adalah: hadirnya keterbukaan dari masing-masing golongan – baik itu Sunni ataupun Syiah – terhadap warga identitas lain yang bukan golongan mereka, yang ingin berpartisipasi dalam praktik keagamaan mereka. Sebagai contoh konkret, warga Sunni mengizinkan warga Syiah untuk berpartisipasi dalam *majelis taklim* rutin yang mereka laksanakan di dusun, bahkan salat Jumat bersama mereka, dan ikut mengaji bersama mereka. Begitu pula dengan warga Syiah, mengizinkan dan bahkan mengundang warga Sunni untuk ikut dalam majelis taklim mereka, praktik simbolik keagamaan, dan bahkan – beberapa tokoh keagamaan Sunni – mendapat bagian penting dalam ruang publik keagamaan mereka, seperti menjadi pemimpin *salawatan*, penceramah, dan anggota kepanitiaan.

Bukti-bukti yang telah disebutkan di atas, menjadi penguat bahwa kehidupan warga Sunni dan Syiah di dalam dusun terpisah bukan adanya riwayat kekerasan. Namun lebih karena hadirnya toleransi antar masing-masing golongan. Selain itu perlu disebutkan bahwa terlepas dari perbedaan nilai keagamaan yang mereka anut, mereka tetap bisa saling bekerja sama dengan terbuka tentang praktik keagamaan mereka terhadap satu sama lain.

Interetnis: Struktur Kewargaan Dusun yang Asosiatif dan *Quotidian*

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pendahuluan, hubungan interaksi yang asosiatif adalah hubungan terstruktur dan terorganisasi dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh para anggotanya; seperti organisasi, komunitas-komunitas hobi, klub-klub fans olahraga dan lain-lain. Sedangkan *quotidian* adalah hubungan interaksi yang sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, seperti komunikasi antar warga di rumah, di warung, di masjid, di lingkungan warga, tradisi kultural, kegiatan kewargaan, dan lain sebagainya.

Pada struktur kewargaan dusun yang berada di lokasi penelitian, terdapat 5 (lima) struktur kehidupan kewargaan yang jenisnya interetnis, yaitu: (1) *Jamaah muawanah*; (2) Ikatan kekerabatan; (3) Tradisi kultural masyarakat; (4) Kegiatan ekonomi; dan (5) Kegiatan RT (Rukun Tetangga).

Dari 5 (lima) bentuk struktur hubungan kewargaan tersebut, 4 (empat) struktur kewargaan sifatnya lebih *quotidian*, yaitu ikatan kekerabatan, tradisi kultural masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kegiatan rukun tetangga. Sedangkan 1 (satu) sifatnya lebih asosiatif yaitu *jamaah muawanah*.

Dalam rangka mendapatkan gambaran secara detail, peneliti akan menguraikan lima jenis hubungan interetnis tersebut secara singkat, yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

Pertama adalah *Jamaah Muawanah*. Secara bahasa *jamaah muawanah* berarti tolong-menolong. Dari 1.500 penduduk yang tinggal di dusun, semuanya adalah anggota dari organisasi tersebut, baik itu beridentitas Sunni ataupun Syiah. Tujuan awal dari dibentuknya organisasi ini – oleh para tokoh-tokoh dusun – adalah untuk meringankan beban ekonomi keluarga dalam mengurus acara berkabung yang ditinggal wafat oleh salah satu anggota keluarganya. Dalam istilah lokal dusun, disebut dengan *tahlilan* atau acara kematian. Perihal logistik dan dana yang digunakan untuk mengurus acara kematian, semua telah disiapkan oleh *Jamaah Muawanah* melalui sumbangan setiap bulan dari penduduk dusun. Menarik untuk digambarkan bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan tata cara pengurusan kematian antara warga Sunni dan Syiah, seperti membungkus kain kafan dan ritual salat *mayit*. Meskipun terdapat perbedaan, mereka baik Sunni dan Syiah tetap bekerja sama dan saling membantu untuk mengorganisir acara tersebut. Bahkan

mereka bisa tetap bersama-sama melakukan ritual salat *mayit*, meskipun dilakukan secara bergiliran – karena perbedaan tata cara salat. Terlepas apakah yang meninggal itu beridentitas Sunni ataupun Syiah. Pemilihan ketua dan wakil ketua jamaah *muawanah* dilakukan selama 5 tahun sekali, dan posisi tersebut bisa diisi baik itu dari kalangan Sunni atau Syiah, yang dipilih melalui *voting*. Saat peneliti berada di lapangan, jabatan ketua *jamaah muawanah* diisi oleh warga beridentitas Syiah, dengan wakil seorang Sunni.

Kedua adalah ikatan kekerabatan. Ikatan kekerabatan di Dusun Sendangsari antara Sunni dan Syiah banyak yang bersifat interetnis, baik dalam konteks keluarga *batih* (inti) dan juga keluarga *luas*. Selama proses wawancara di lapangan, masing-masing pihak Sunni dan Syiah sangat sering mengemukakan tentang fakta tersebut, bahkan fakta ‘ikatan’ tersebut menjadi alasan kuat – dari para informan – tentang mengapa Sunni dan Syiah bisa hidup berdampingan tanpa kekerasan hingga sampai saat ini. Lalu di antara tokoh-tokoh agama dari kedua belah pihak – Sunni dan Syiah – memiliki hubungan kekerabatan yang interetnis, terutama dalam ruang lingkup keluarga *luas*. Bahkan dalam hubungan bertetangga pun banyak dari mereka memiliki hubungan kekerabatan, yang mana implikasi dari hal tersebut adalah terjadinya intensitas interaksi sosial yang terjadi setiap hari (*quotidian*). Selain itu ada beberapa unit keluarga yang suami beridentitas Syiah dan istri beridentitas Sunni atau sebaliknya, hal ini disebabkan karena legitimasi dari tokoh-tokoh keagamaan dusun seperti ustaz atau kiai yang ‘merestui’ hubungan pernikahan yang terjadi antara Sunni dan Syiah, tanpa salah satu dari calon (yang akan menikah) harus (wajib) mengikuti (atau berpindah) kepada salah satu keyakinan dari calon pasangannya. Sebab masing-masing dari tokoh keagamaan baik Sunni dan Syiah mengakui bahwa mereka tetap Islam, dengan Nabi dan Alquran yang sama. Meskipun memang ada perbedaan pada hal-hal tertentu.

Ketiga adalah interetnis dalam tradisi kultural. Tradisi kultural adalah adat istiadat atau kebiasaan (*custom*) masyarakat yang sudah turun-temurun diwariskan oleh sepuh (tetua) kepada anak dan generasi penerus selanjutnya. Sebagaimana umumnya masyarakat paguyuban Jawa, tradisi kultural di dusun Sendangsari bentuknya sama dengan perayaan khas upacara masyarakat Jawa, yang biasa dikenal dengan *slametan*. *Slametan* dalam segi upacaranya bisa bermacam-macam, tergantung peristiwa yang melatar-belakanginya, apakah itu kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Baik itu Sunni ataupun Syiah jika melaksanakan *slametan*, akan saling mengundang satu sama lain karena hubungan ketetanggaan dan kekerabatan. Selain itu bila menelisik secara detail, dalam *slametan* tersebut baik Sunni dan Syiah biasa berdoa secara bersama-sama, jika tuan rumah adalah seorang Syiah dan memiliki sepuh (orang yang dituakan) seorang Sunni, pimpinan doa biasa diserahkan kepada sepuh tersebut sebagai bentuk penghargaan, dan begitu pula yang terjadi sebaliknya. Hal lain lagi adalah dalam tradisi kultural yang makro (besar), sebagai contoh dalam istilah lokal mereka adalah *haul* Mbah Muhammad Arif. Pada tradisi yang rutin diadakan selama satu tahun sekali ini, baik warga Sunni dan Syiah, apakah yang muda ataupun yang tua, sama-sama membentuk kepanitiaan untuk merayakan tradisi kultural tersebut. Mulai dari waktu sore hari – di malam 1 Muharram – sampai esok hari. Terjadi interaksi kerja sama yang intens dalam tradisi kultural tersebut, dan memang baik Sunni dan Syiah sangat menghormati Mbah Muhammad Arif sebagai pendiri dan *sesepuh* warga dusun. Dalam salah satu wawancara dengan informan kunci menyebutkan bahwa seluruh penduduk dusun baik itu Sunni dan Syiah menganggap diri sebagai *anak putu* (anak-cucu) Mbah Muhammad Arif, sehingga dikatakan Mbah Muhammad Arif adalah seorang ulama, pendiri, pejuang, dan pemersatu bagi warga Sunni atau Syiah yang tinggal di Dusun Sendangsari.

Keempat adalah kerja sama dan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dusun Sendangsari terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pengusaha dan buruh mebel (kayu), petani, pedagang-pedagang pasar (atau pemilik warung), dan para pegawai-pegawai suatu instansi pemerintahan dan swasta. Wadah ekonomi yang interetnis antara Sunni dan Syiah pada masyarakat dusun berada di tiga kategori ekonomi, yaitu dalam perusahaan (kerajinan) kayu, hubungan pertanian, dan terakhir adalah hubungan jual-beli dan kerja sama antara pedagang-pedagang pasar dan pemilik warung. Bentuk hubungan ekonomi antara Sunni dan Syiah peneliti bagi menjadi dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal lebih pada hubungan kerja sama yang setara, sebagai contoh beberapa warga Sunni memiliki usaha warung di dalam dusun, dan mereka biasa bertransaksi dengan beberapa warga Syiah yang memiliki usaha kecil rumahan seperti pembuatan kerupuk, roti, dan makanan-makanan ringan lainnya. Sedangkan vertikal adalah hubungan atasan dan bawahan, hal ini berada dalam kategori ekonomi

perusahaan kayu dan pertanian. Terdapat satu perusahaan kayu besar milik warga Sunni, dan satu perusahaan kayu menengah milik warga Syiah. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki beberapa pekerja baik itu beridentitas Sunni dan Syiah. Lalu dalam hubungan pertanian – berdasarkan temuan penelitian – beberapa warga Sunni yang memiliki tanah biasa menyewa buruh-buruh harian yang beridentitas Syiah, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dikatakan pada hubungan ekonomi baik warga Sunni dan Syiah tidak bersifat intraetnis, atau hanya bertransaksi dengan warga yang sama identitas keagamaannya. Hal ini tercermin pula pada hubungan-hubungan lain yang berada di luar ekonomi, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan pada kategori-kategori interetnis yang sebelumnya.

Terakhir – kelima – adalah pada hubungan kegiatan rukun tetangga (RT). Sebelumnya perlu disebutkan bagaimana komposisi penduduk berdasarkan etnis keagamaan di tiap RT. Terdapat 5 (lima) RT yang berada di dusun Sendangsari, dengan jumlah penduduk kurang lebih 1500. Warga beridentitas Sunni tersebar di 5 (lima) RT tersebut, sedangkan warga Syiah hanya berada di RT 02, 03, dan 04. Terlebih struktur pemukiman rumah penduduk tidak terpisah-pisah oleh lahan-lahan pertanian atau perkebunan (*scattered village*), namun menyatu dan tinggal saling berdekatan (*integrated village*). Hal ini sekali lagi menjadikan interaksi sosial antar penduduk sangat intens, sehingga baik warga Sunni dan Syiah saling mengenal satu sama lain. Mengenai acara rutin kegiatan RT justru yang aktif adalah RT 03 dan 04, yang terdapat penduduk Sunni dan Syiah. Tapi terkadang ada pula warga Sunni dan Syiah dari RT lain yang ikut dalam kegiatan mereka. Perlu disebutkan pula bahwa ketua RT 02, 03, dan 04 beridentitas Syiah, sedangkan ketua RT 01 dan 05 beridentitas Sunni, pemilihan ketua RT tersebut dilakukan dengan *voting* dengan jangka waktu lima tahun sekali. Hal ini menandakan bahwa tidak ada sentimen keagamaan antara warga Sunni dan Syiah di dusun, mengenai pemilihan posisi tertentu.

Lalu, selama peneliti berada di lapangan, aktif dan tidaknya kegiatan RT semakin jelas terlihat pada saat Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Yaitu pada saat *tirakatan* dan lomba-lomba yang diadakan pada Hari Kemerdekaan tersebut. Semua RT mengadakan *tirakatan*, kecuali RT 01. Cara *tirakatan* masing-masing RT pun berbeda, RT 02 hanya mengadakan doa dan makan bersama. RT 03 mengadakan doa, makan bersama, dan menyediakan panggung kecil di mana para pemuda mempresentasikan kegiatan seni seperti nyanyian PAUD dari anak-anak dan pementasan drama yang diperankan oleh para pemuda-pemudi RT – baik Sunni dan Syiah berada di dalam kegiatan tersebut. Lalu keesokan harinya pada 17 Agustus diadakan lomba-lomba seperti balap karung, tarung bantal, makan kerupuk dan lain-lain. Sedangkan RT 04 (yang mayoritas Syiah) mengadakan doa, makan bersama, dan pemutaran film yang dibuat oleh para pemuda dan pemudi RT, dan dilanjutkan pula dengan lomba-lomba juga karnaval pada keesokan harinya. Lalu yang terakhir RT 05, mereka melakukan obor keliling pada malam harinya, keesokan harinya mereka melaksanakan karnaval dengan keliling menggunakan kostum-kostum yang unik, dan juga lomba-lomba untuk anak-anak dan para warga setempat. Akan tetapi terkadang banyak warga dari RT lain menghadiri acara-acara yang diadakan suatu RT tertentu, sehingga acara mereka sifatnya sangat inklusif dan terbuka, dan tidak sama sekali eksklusif.

Data kualitatif – kehidupan kewargaan antara Sunni dan Syiah yang intraetnis dan interetnis – dengan menggunakan hipotesis Varshney (2002) tergambar jelas dalam kehidupan di dusun Sendangsari. Namun hal tersebut belum menjelaskan bagaimana realitas interaksi tersebut bisa meredam konflik atau ketegangan yang pernah timbul antar dua komunitas keagamaan tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan data tentang konflik-konflik yang pernah terjadi – yang terkait dengan etnis keagamaan Sunni dan Syiah, serta bagaimana kedua golongan tersebut berusaha menyelesaikan hal tersebut.

Pencegahan Potensi Konflik dan Kekerasan

Terdapat beberapa kasus yang penulis dapatkan tentang bagaimana warga dusun Sunni dan Syiah mengelola ketegangan dan potensi konflik di antara mereka, yaitu :

Peredaman Ujaran Kebencian Ustaz F

Ustaz F adalah salah satu dari ‘orang luar’ (baca: bukan orang asli) yang baru saja menetap di dusun karena menikah dengan warga asli dusun. Beliau sering memberikan ceramah melalui majelis taklim rutin yang diorganisasi oleh salah satu organisasi wanita NU (Nahdlatul Ulama), yang bernama Muslimat. Dalam satu kesempatan – di majelis taklim – ustaz F menyatakan kebenciannya kepada Syiah, dan menyebutkan bahwa Syiah termasuk aliran sesat. Hal ini lalu tersebar kepada penduduk di dusun antara Sunni dan Syiah, sehingga

para tokoh dari dua etnis keagamaan tersebut bersama-sama mendatangi Ustaz F untuk meminta klarifikasi. Setelah dilakukan pertemuan, pada akhirnya Ustaz F meminta maaf baik kepada tokoh-tokoh golongan Sunni dan Syiah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Para tokoh-tokoh dusun – saat wawancara – menyebutkan hal ini sebagai bentuk '*kecolongan*', sebab biasanya para tokoh Sunni dan Syiah jika mengundang orang luar untuk ceramah, akan berdialog dengan penceramah, dan menjelaskan tentang keadaan dusun yang terbagi antara komunitas Sunni dan Syiah, dan meminta agar tidak ada muatan ceramah yang menimbulkan ketersinggungan terhadap salah satu komunitas yang berada di dusun, karena akan berpotensi menimbulkan konflik. Gaya penyelesaian yang dilakukan oleh para tokoh keagamaan setempat adalah dengan melakukan klarifikasi secara tertutup kepada Ustaz F. Koordinasi dilakukan dengan kepala desa agar bersiap-siap untuk turun menangani konflik jika klarifikasi secara tertutup tersebut tidak berhasil mengekang atau mengubah persepsi (*attitude*) Ustaz F.

Singkatnya, pada akhirnya, imbas persepsi negatif justru berbalik kepada Ustaz F. Banyak warga dusun mengungkapkan bahwa Ustaz F termasuk orang yang tidak memahami agama, setelah ujaran kebencian yang dikemukakan secara terbuka – kepada Syiah – di lingkungan warga dusun.

Penolakan Bersama terhadap Program Pesantren Syiah dari Bangil

Kondisi yang (yang dianggap) bisa menimbulkan 'ketegangan' bagi warga dusun (baik warga Sunni dan Syiah) adalah 'program-program' yang diadakan oleh orang-orang Syiah yang berasal dari luar desa, menurut penuturan informan kebanyakan mereka berasal dari Bangil. Program yang pernah ditawarkan saat itu adalah usaha komunitas Syiah untuk mendirikan pesantren di wilayah dusun, tepatnya di Musala Al-Husaini. Saat itu para anggota Syiah dari Bangil meminta izin kepada perwakilan warga Sunni seperti kepala dusun, dan tokoh-tokoh Ahlul Sunnah di wilayah dusun dengan bertemu secara langsung.

Berdasarkan penuturan kepala dusun, tokoh-tokoh warga menolak untuk didirikannya pesantren. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kekhawatiran dan menyebabkan 'panas' (ketegangan) di antara warga Sunni dan Syiah di dusun. Bahkan beberapa tokoh Syiah warga dusun tidak setuju dengan pendirian pesantren, sehingga sempat terjadi perdebatan antara anggota Syiah dari Bangil dengan tokoh Syiah dari warga dusun sendiri. Berdasarkan penuturan informan penulis, warga Sunni dan Syiah di dusun khawatir jika pendirian pesantren tersebut bisa mengakibatkan konflik sebagaimana yang terjadi di Bangil, yang bisa menyebabkan suasana tidak kondusif. Hal ini menandakan terdapat konsensus nilai bersama yang dipegang oleh warga Sunni dan Syiah mengenai situasi dusun, agar situasi kerukunan tetap terjaga.

Menjembatani Kesalahpahaman dan Regulasi Diri

Kasus ini terjadi pada Hari Raya Iduladha, 2015. Permasalahannya terjadi karena saat pembagian daging kurban, warga Syiah tidak mendapatkan jatah daging yang biasa diantarkan di rumah-rumah mereka dari panitia warga Sunni. Hal ini terjadi karena ada ketua panitia baru (sebut saja K) yang masih kurang berpengalaman dalam mengorganisasi pembagian daging kurban. Menurut pernyataan yang bersangkutan, banyak warga yang mengambil jatah daging sendiri tanpa menghiraukan imbauan panitia. Hal ini lantas menyebabkan protes dan marah dari tokoh dan warga Syiah kepada para tokoh Sunni. Tokoh Sunni kemudian bersama dengan ketua panitia yang bertanggung jawab – terhadap pembagian daging kurban – mendatangi tokoh Syiah untuk menjembatani kesalahpahaman tersebut, dan meminta maaf serta memberi penjelasan bahwa dirinya masih 'baru', dan belum bisa mengatur warga agar tertib saat pembagian daging kurban. Setelah adanya bentuk klarifikasi yang dibantu oleh tokoh warga Sunni, pada akhirnya tokoh Syiah tersebut memaklumi dan memaafkan K atas peristiwa tersebut, serta berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi tahun depan. Meskipun masalah telah terselesaikan, namun 'sisa-sisa' kekesalan – atas peristiwa tersebut – masih diungkit oleh salah satu pemuda Syiah, dan hal tersebut terdengar oleh K. Dalam wawancara dengan peneliti, K sebenarnya kesal dan ingin melakukan konfrontasi terhadap pemuda Syiah tersebut. Namun K tetap menahan diri (regulasi diri), sebab bisa membuka kembali permasalahan yang telah terselesaikan dengan baik di antara tokoh-tokoh dusun – baik itu Sunni dan Syiah. Pada akhirnya K lebih bersikap

‘membiarkan’ pemuda tersebut demi menghormati tokoh-tokoh dusun – baik itu Sunni dan Syiah, karena telah menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh K.

Pembahasan

Struktur Kehidupan Kewargaan yang Melampaui Batas Etnis Keagamaan

Teori Varshney (2002) mengenai *civic engagement*, yang terdiri dari dua (dua) jenis partisipasi kewargaan yaitu inter-etnis dan intra-etnis, serta terdiri lagi dari 2 (dua) sub-bentuk hubungan, yaitu hubungan asosiatif dan *quotidian*, memiliki kesesuaian dengan data kualitatif yang telah peneliti kumpulkan di lapangan penelitian.

Meskipun terdapat pemisahan dalam ruang publik keagamaan (intraetnis), hal ini tidak menjadikan warga – Sunni dan Syiah – saling memisahkan diri pada kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Bahkan kegiatan intraetnis masing-masing etnis keagamaan ini lebih inklusif ketimbang eksklusif, sebab – secara kualitatif – beberapa warga Sunni ada yang berpartisipasi pada ruang publik keagamaan Syiah, dan beberapa warga Syiah ada pula yang berpartisipasi pada ruang publik keagamaan Sunni, sehingga dapat dikatakan batas-batas ruang etnis keagamaan mereka tidak kaku.

Hal tersebut ditambah dengan hadirnya hubungan interetnis – baik itu asosiatif dan *quotidian* – yang kuat, yang pada hakikatnya – sebelum warga dusun berpindah menjadi Syiah ditahun 1980-an, hubungan ini telah terbentuk sedemikian rupa pada: (1) *Jamaah muawanah*; (2) Ikatan kekerabatan; (3) Tradisi kultural masyarakat; (4) Kegiatan ekonomi; dan (5) Kegiatan RT (Rukun Tetangga). Varshney (2002) menyebut hubungan tersebut dengan istilah “*preexisting local network of civic engagement*”, yaitu hubungan sosial kewargaan yang memang sudah terbentuk, di mana terdapat komunikasi, kerja sama, dan ikatan interkomunal yang kuat di dalamnya, dan terlebih – yang perlu mendapat penekanan utama – hubungan tersebut melampaui batas-batas etnis keagamaan.

Batas-batas etnis keagamaan antara komunitas Sunni dan Syiah di dusun menjadi ‘lebur’ dengan hadirnya hubungan asosiatif dan *quotidian* tersebut. Hal ini tentunya tanpa adanya pelanggaran nilai keagamaan – yang dianut – dari masing-masing pihak. Ikatan, partisipasi, dan kerja sama tersebut menjadi titik temu antar golongan dalam dusun. Sehingga jika ada upaya-upaya polarisasi etnis keagamaan – sebagaimana yang telah peneliti gambarkan pada beberapa kasus di atas, warga Sunni dan Syiah lebih memilih untuk melakukan klarifikasi, dialog, dan kerja sama, ketimbang menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan. Bahkan aktor-aktor yang hendak melakukan polarisasi – sebagaimana kasus Ustaz F – akan terkekang, dan sebaliknya justru mendapat imbas persepsi negatif karena berusaha merusak hubungan damai yang sudah terjalin sekian lama.

Jika membandingkan hubungan interetnis mana yang lebih berpengaruh terhadap koeksistensi damai di dusun, maka secara analisis hubungan asosiatif seperti *Jamaah muawanah* lebih kentara dalam menggambarkan perilaku damai antara dua golongan tersebut. Sebab tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terlihat lebih jelas dan terorganisasi, terlepas dari perbedaan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Hal ini semakin menguatkan hipotesis Varshney (2002), bahwa jika terdapat organisasi khusus yang aktif (*vibrant organization*) melayani kebutuhan (*needs*) ekonomi, kultural, dan sosial, antara dua komunitas (yang berbeda secara etnis), dukungan terhadap perdamaian (antara dua komunitas) tidak hanya kuat, namun juga mengokohkan manifestasi (ekspresi) damai antara dua komunitas tersebut (*solidly expressed*), sebab organisasi asosiasional tersebut memiliki kapasitas lebih untuk melayani (menjembatani) objek-objek (kepentingan) interaksi sosial yang bukan bagian dari objek interaksi *quotidian* (sehari-hari).

Objek-objek interaksi *quotidian* yang tidak tersentuh dalam dusun, diorganisasi dalam *jamaah muawanah*. Dana yang dikumpulkan – *jamaah muawanah* – tidak hanya disalurkan pada saat acara kematian, tetapi pada perbaikan infrastruktur seperti jalanan yang rusak, hingga penyumbangan terhadap orang yang tidak mampu di dalam warga dusun, yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Nilai-nilai gotong royong dan toleransi termanifestasi secara signifikan dalam organisasi tersebut. Meskipun tidak dipungkiri bahwa interaksi *quotidian* antar warga dusun juga memanifestasikan nilai-nilai tersebut. Seperti dalam tradisi kultural, hubungan kekerabatan, kegiatan rukun tetangga (RT), dan kegiatan ekonomi. Implikasi dari hal tersebut adalah adanya

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities, Education, Management, History, Economics, Linguistics, Literature, Religion, Politics, Sociology, Anthropology, and others.

mekanisme pencegahan konflik yang terbentuk secara sadar, seperti *self-policing* atau *self – intra communal – policing*, yang diungkapkan oleh Fearon dan Laitin (1996) dan Varshney (2002).

Mekanisme *Self-policing* : Implikasi dari Hubungan yang Interetnis

Kuatnya hubungan interetnis – antar golongan – di dalam dusun menimbulkan mekanisme pencegahan konflik seperti *self-policing*. Varshney (2002) menyebut hal ini sebagai *self – intra communal – policing*, yang merupakan ekstensi (implikasi) dari struktur interaksi kewargaan yang interetnis. Sedangkan Tadjoeidin (2004) menyebut hal ini dengan kontrol atau koordinasi elit (tokoh-tokoh) tiap golongan kepada anggotanya, untuk tidak menimbulkan ketegangan atau konflik terhadap golongan yang lain. Pada intinya hal ini menekankan bagaimana para tokoh masing-masing etnis keagamaan mengontrol perilaku anggotanya untuk tidak menimbulkan permasalahan dengan kelompok lain.

Dalam konteks penelitian penulis – terkait *self policing*, baik tokoh-tokoh Sunni dan Syiah saling bekerja sama untuk tidak menyinggung nilai-nilai yang dianut antar masing-masing keagamaan, terutama pada ruang-ruang publik (majelis taklim, tradisi kultural, pertemuan RW, RT, dll.) di mana biasanya menjadi ‘lahan’ untuk menimbulkan provokasi. Berdasarkan wawancara dengan informan, mereka sering mengundang para penceramah dari luar, dan sebelum mengundang, setiap para penceramah akan diberitahu mengenai kondisi dusun yang telah terbagi menjadi dua komunitas keagamaan, dan meminta untuk berhati-hati dalam ceramah yang akan ditampilkan. Oleh sebab itu pula – informan peneliti, menyebut kasus Ustaz F sebagai bentuk ‘*kecolongan*’, sebab mereka tidak menyangka Ustaz F – sebagai orang yang menikah dengan orang dalam dusun melakukan ujaran kebencian. Karena pada dasarnya mereka selalu berupaya agar ujaran-ujaran bernada kebencian terkekang sedemikian rupa. Meskipun begitu, pada akhirnya tokoh dari masing-masing keagamaan, tetap melakukan praktik *self-policing* dalam kasus Ustaz F. Namun *self-policing* tersebut lebih kepada *pasca* ujaran kebencian mengemuka, bukan pada *pra* atau sebelum narasi kebencian tersebut dikemukakan oleh Ustaz F. Sehingga dalam konteks penelitian ini, *self policing* terbagi menjadi dua, yaitu saat sebelum potensi konflik muncul, dan saat setelah konflik mengemuka.

Mekanisme pencegahan *self policing* ini sangat penting, sebab lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya spiral atau eskalasi kekerasan (Tadjoeidin, 2004). Yaitu aksi balas-membalas yang dilakukan dengan kekerasan. Seandainya hanya warga Syiah saja yang mendatangi Ustaz F untuk melakukan klarifikasi atau mencoba untuk melakukan kontrol perilaku terhadap Ustaz F, tentu secara probabilistik keluaran (*outcome*) dari upaya pencegahan konflik memiliki risiko terjadinya eskalasi konflik. Sebab telah diketahui bahwa Ustaz F tidak menyukai (menghargai) keberadaan warga Syiah. Namun ketika tokoh Sunni dan Syiah bekerja sama, maka Ustaz F tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan sikap negatifnya, sebab tidak adanya dukungan dari tokoh atau warga Sunni, yang justru memiliki kesamaan identitas agama dengan Ustaz F.

Tentu mekanisme ini tidak akan hadir, jika – sebelumnya – tidak terjalin hubungan interetnis yang kuat antara komunitas Sunni dan Syiah di dusun. Adanya hubungan komunikasi dan kerja sama yang baik antara komunitas Sunni dan Syiah, memiliki probabilistik implikasi – yang lebih besar – agar mereka bekerja sama menyelesaikan konflik dengan cara damai, ketimbang memperparah konflik dengan cara kekerasan. Hal ini pula yang menyebabkan Varshney (2002) menyebut mekanisme pencegahan konflik seperti *self policing*, sebagai ekstensi, implikasi, atau perpanjangan sikap dari hubungan interetnis yang kuat. Namun perlu dicatat, Varshney (2002) tetap menekankan hal ini masih probabilistik, bukan deterministik, sebab diperlukan fakta-fakta empiris lain untuk memperkuat hipotesis ini. Meskipun dalam penelitian penulis – hipotesis tersebut – terbukti kuat secara empiris dalam menjelaskan bahwa *self policing* menjadi salah satu penyebab koeksistensi damai antara hubungan Sunni dan Syiah di dusun Sendangsari, Jepara.

Integrasi Elit dan Komunal: Konsensus Nilai Kultural, Struktural, dan Legitimasi Perilaku Damai

Varshney (2002) tidak menjelaskan apa yang menyebabkan partisipasi interetnis tersebut bisa timbul dalam kehidupan masyarakat multietnis yang damai. Namun Tadjoeidin (2004) mencoba menjelaskan – berdasarkan Higley dan Moore (1981) – bahwa hubungan interetnis ini

bisa terjalin karena adanya integrasi ditingkat elit dan komunal, dan integrasi ini disebabkan oleh hadirnya konsensus nilai bersama yang ada dalam masyarakat tersebut.

Konsensus nilai ini melandasi sikap (*attitude*) atau keputusan apa yang baik, dan yang tidak baik untuk dipraktikkan dalam wilayah dusun. Peneliti membagi konsensus nilai ini menjadi dua, yaitu konsensus nilai pada konteks kultural dan konsensus nilai pada konteks struktural.

Pada konteks kultural, ini terkait dengan pendiri Dusun Sendangsari yaitu Mbah Muhammad Arif. Baik komunitas Sunni dan Syiah di dusun, menafsirkan diri mereka sebagai *anak putu* (anak-cucu) Mbah Muhammad Arif; dan masing-masing – secara interpersonal – mengakui (atau memberi pengakuan) bahwa semua penduduk yang tinggal di dusun (baik Sunni dan Syiah) adalah *anak putu* Mbah Muhammad Arif. Sikap penafsiran ini semakin kentara (*salience*) terlihat ketika komunitas Sunni dan Syiah berpartisipasi dan bekerja sama dalam tradisi *haul* Mbah Muhammad Arif – yang diadakan – setiap satu tahun sekali. Mbah Muhammad Arif dipersepsikan oleh diri mereka (Sunni dan Syiah) sebagai leluhur yang telah berjasa dalam mengislamkan Dusun Sendangsari, bahkan Jepara Utara (Amaliah, 2015).

Secara tidak langsung, dengan adanya penafsiran tersebut, baik warga Sunni dan Syiah terikat oleh wasiat atau pesan Mbah Muhammad Arif, yang selalu dibacakan para tokoh-tokoh dusun pada saat tradisi kultural seperti *haul* (1 Muharram) dan *tirakatan* (17 Agustus), yang pada hakikatnya berpesan bahwa warga dusun harus saling tolong-menolong, rukun, dan saling bekerja sama antar satu sama lain. Hal ini pula yang melandasi dari terbentuknya Jamaah Muawanah, di mana merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang ditekankan oleh wasiat tersebut.

Selain itu, sejak sebelum etnis keagamaan terbagi menjadi dua golongan, baik Sunni dan Syiah – dalam konsensus kultural ini – memiliki kesepakatan dalam dua hal agar suasana tetap kondusif di dalam dusun. Yaitu sepakat melarang minum-minuman keras, serta sepakat melarang pertunjukan musik modern seperti *dangdut* dan lain sebagainya, kecuali jika pertunjukan musik tersebut bernuansa *Islami*, dengan alat musik pukul *terbangan* sebagai pengiringnya. Berdasarkan wawancara – secara emik, dua hal ini yang menurut mereka menjadi sebab terjadinya pertengkaran di dusun-dusun lain yang ada di wilayah desa Banjarn. Tentu dengan adanya konsensus nilai ini, potensi-potensi kekerasan komunal terhindarkan di wilayah Dusun Sendangsari. Meskipun konsensus ini tidak langsung terkait Sunni dan Syiah, tapi mengingat adanya dikotomi keagamaan dalam dusun, dua hal tersebut tanpa terduga bisa saja berpotensi memicu konflik bernuansa keagamaan. Sebagaimana Tadjoeidin (2004) mengungkapkan bahwa sebab kekerasan antar komunitas etnis keagamaan cenderung dipicu oleh konflik ‘antarindividu’, yang akan tereskalasi jika situasi tidak ditangani dengan baik oleh para tokoh etnis keagamaan.

Lalu pada konteks struktural, konsensus ini ditandai dengan adanya pembagian peran atau kuasa (struktural) yang ada di dusun Sendangsari. Tadjoeidin (2004) berdasarkan Higley dan Moore (1981), menyebutnya dengan *power sharing*, *consociational polity*, atau integrasi elit (tokoh-tokoh antar komunitas). Pada konsensus struktural ini, terdapat mekanisme pemilihan yang demokratis pada ruang lingkup RT, RW, Jamaah Muawanah, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di dalam dusun; yang pemilihannya didasarkan atas musyawarah dan voting.

Sebagai contoh, saat peneliti berada di lapangan, ketua organisasi informal Jamaah Muawanah beridentitas Syiah, dan wakilnya adalah seorang Sunni; sedangkan pada 5 (lima) tahun sebelumnya, ketua Jamaah Muawanah diisi oleh orang Sunni. Begitu pula dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dahulu yang dipilih adalah seorang Syiah, dan sekarang adalah seorang Sunni. Bahkan dalam pemilihan ketua RT terkadang diisi oleh seorang Sunni, dan kadang pula oleh seorang Syiah. Hal ini pun berlanjut pada pembagian peran dalam tradisi kultural, di mana masing-masing Sunni dan Syiah memiliki peran sebagai pemimpin tradisi, *salawatan*, pembina, ketua panitia, dan lain-lain.

Hal ini menandakan absennya diskriminasi atas identitas keagamaan, terkait peran-peran penting (struktural) yang harus diisi oleh warga dusun. Selain itu, konsekuensi dari pembagian peran ini mereduksi kecemburuan-kecemburuan sosial yang mungkin terjadi antar golongan Sunni dan Syiah, serta sebaliknya mendorong peran aktif setiap warga – terlepas dari identitas keagamaannya – untuk berkontribusi pada aspek kehidupan Dusun Sendangsari. Berdasarkan wawancara, pembagian peran ini tidak lepas pula dari konsensus nilai atau norma bersama yang menjadi fakta kognitif warga dusun – baik itu Sunni ataupun Syiah, yaitu *urusan keagamaan menjadi hak pribadi masing-masing individu, namun ketika masuk pada urusan sosial hal itu menjadi kewajiban bersama antar warga dusun*.

Tadjoedin (2004) mengungkapkan pula bahwa dengan adanya integrasi pada tingkat elit (*power sharing; consociational polity*) ini, para tokoh-tokoh komunitas akan mampu membangun rasa saling percaya (*mutual trust*) dan terdorong untuk memahami antar satu sama lain. Seandainya terjadi konflik, maka komunikasi atau dialog antar tokoh akan lebih mudah terbangun, sehingga permasalahan pada tingkat warga bisa dimediasi oleh para tokoh-tokoh tersebut, sebagaimana pada kasus-kasus yang telah peneliti sebutkan sebelumnya.

Selain itu, meskipun hal ini tidak dibahas oleh para peneliti konflik etnis keagamaan yang peneliti rujuk, hadirnya konsensus nilai bersama ini memberikan legitimasi terhadap perilaku damai antara Sunni dan Syiah, seperti toleransi saat acara kematian, pembagian peran kultural, struktural, serta kerja sama dalam bidang-bidang lain antar etnis keagamaan. Pada saat yang sama mendelegitimasi perilaku-perilaku yang berpotensi menimbulkan kekerasan antar etnis keagamaan di Dusun Sendangsari.

PENUTUP

Hasil analisa terhadap penyebab koeksistensi damai antara komunitas Sunni dan Syiah di dusun Sendangsari, Jepara; menunjukkan bahwa hipotesis atau teori Varshney (2002) tentang variabel struktur kewargaan (*structure of civic life*) yang melampaui batas-batas etnis keagamaan memiliki korelasi positif dengan hasil penelitian penulis. Hal ini ditandai dengan hadirnya 5 (lima) hubungan interetnis yang berkontribusi secara positif dalam merekatkan dikotomi keagamaan yang hadir di dusun Sendangsari. Serta tertanganinya potensi-potensi konflik dengan terbangunnya komunikasi, klarifikasi, dan mekanisme *self policing* antar dua etnis keagamaan, menjadi bukti penambah yang menguatkan teori tersebut. Sebab – secara empiris – tanpa hadirnya hubungan interetnis, maka mekanisme pencegahan konflik seperti bentuk komunikasi, klarifikasi, dan *self policing* tidak akan hadir di dusun Sendangsari.

Selanjutnya, konsensus nilai yang terbentuk pada konteks kultural dan struktural – yang menjadi penanda dari integrasi elit dan komunal – menjadi landasan kuat serta memberikan legitimasi terhadap hubungan interetnis yang rukun antara warga Sunni dan Syiah di dusun. Sehingga upaya-upaya polarisasi terhadap dua etnis keagamaan, ter-delegitimasi dan tidak mendapatkan dukungan baik itu secara kultural maupun struktural. Realitas hubungan damai antara dua golongan keagamaan ini secara konsisten sejalan dengan prinsip atau sikap kognitif dari para warga dusun, yaitu *urusan keagamaan menjadi hak pribadi masing-masing individu, namun ketika masuk pada urusan sosial hal itu menjadi kewajiban bersama antar warga dusun*. Sehingga baik warga Sunni dan Syiah di Dusun Sendangsari, tetap bisa berkoeksistensi secara damai, terlepas dari perbedaan nilai keagamaan yang hadir dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah, M. (2012). Dari Masjid ke Panggung Politik: Studi Kasus Peran Pemuka Agama dan Politisi dalam Konflik Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur. *Tesis*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Amaliyah, E. I. (2015). Harmoni di Banjaran: Interaksi Sunni dan Syiah. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14 (2): 81-96.
- Elisabeth, M. Z., dkk. (2009). *Syiah Lokal: Studi Identitas dan Akomodasi Kultural Syiah di Jepara dan Pekalongan*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Fearon, J. D. dan Laitin, D.D. (1996). Explaining Interethnic Cooperation. *The American Political Science Review*, 90(4): 715-735.
- Miftakhudin, A. (2013). Toleransi Beragama antara Minoritas Syiah dan Mayoritas Nahdliyyin di Desa Margolinduk Bonang Demak. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN.
- Panggabean, R. & Fauzi, I. A., dkk. (2014). *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Sahma. (2014). Konflik Sunni dan Syiah: Studi Kasus Tentang Pertikaian antara Penganut Paham Sunni dan Paham Syiah – YAPI Bangil di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2007. *Tesis*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Tadjoeddin, M. Z. (2004). Civil Society Engagement and Communal Violence: Reflection of Various Hypotheses in the Context of Indonesia. *Politics Administration and Change*, 42(1): 1-18.

Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India*, New York: Yale University Press.

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities,
Education,
Management,
History,
Economics,
Linguistics,
Literature,
Religion,
Politics,
Sociology,
Anthropology,
and others.